

---

## Arus Baru Politik Islam: Pluralisme, Kontestasi, dan Demokratisasi

Muhammad Adib<sup>1</sup>, Nur Qomari

*Dosen tetap Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyah IAI Al-Qolam, Malang, Indonesia,*

<sup>1</sup> Email: [m.adib@alqolam.ac.id](mailto:m.adib@alqolam.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Article History:*

*Received Oct 2017*

*Accepted Oct 2017*

*Available Online Jun 2018*

---

*Keywords:*

*Political Contestation,*

*Democratization,*

*Process of Becoming*

---

### ABSTRACT

The recently political contestations in the Muslim world confirmed a new wave of Islamic politics. The political dynamics that have revolved so quickly and surprisingly, especially in non-Arab countries, are evidence that questioning the harmony between Islam and democracy, pluralism and human rights is no longer relevant. Even though it is not monolithic and is still in the “process of becoming”, the political dynamics that are revolving in a number of Muslim-majority countries actually lead to the same goal, namely the realization of a democratic and civilized politics.

---

## PENDAHULUAN

Pada tahun 2002-2003 yang lalu, terdapat sebuah proyek penelitian kolaboratif bertajuk “Civic Pluralist Islam: Policies and Prospects for a Changing Muslim World”. Proyek ini didanai oleh Institute on Culture, Religion, and World Affairs (CURA) Boston University bekerjasama dengan Pew Charitable Trusts yang berkedudukan di Philadelphia,

Pennsylvania. Proyek ini diikuti oleh sejumlah pakar tentang Islam dan politik dari beberapa perguruan tinggi di Amerika. Sebut saja, misalnya Robert W. Hefner (Boston University), Bahman Baktiari (University of Maine), John R. Bowen (Washington University), Dale F. Eickelman (Dartmouth College), Diane Singerman (American University), dan Muhammad Qasim Zaman (Brown University).<sup>1</sup>

Alih-alih tentang tragedi 11 September 2001 yang terjadi setahun sebelumnya, proyek penelitian tersebut justru mengamati dari dalam (*from within*) fenomena politik umat Islam, terutama dari perspektif demokrasi dan pluralisme kerakyatan. Perspektif ini, menurut Hefner, diharapkan bisa menjembatani kesenjangan (*gap*) antara kalangan akademisi, di satu pihak, dan para pelaku politik serta masyarakat publik, di pihak yang lain, ketika memahami perkembangan dunia Islam. Kesenjangan (*gap*) tersebut terjadi karena kesalahan perspektif dalam mengamati perkembangan pemikiran dan pergerakan politik Islam sendiri. Artinya, pengamatan yang dilakukan selama ini terlalu terfokus kepada fenomena yang terjadi Timur Tengah serta menafikan fenomena yang terjadi di kawasan “pinggir” (*periphery, edge*), semisal Turki, Iran, dan Indonesia. Padahal, fenomena di kawasan “pinggir” justru menyajikan indikasi yang lebih jelas tentang peningkatan minat umat Islam terhadap demokrasi dan pluralisme kewargaan (*civic pluralism*). Perspektif baru ini juga memberikan pemahaman penting bahwa fenomena pemikiran dan gerakan politik yang berkembang di dunia Islam sebenarnya tidak bersifat monolitik.<sup>2</sup>

## Islam dan Demokrasi

Keterpakuan hanya pada fenomena di kawasan Timur Tengah itulah, menurut Hefner, yang menyebabkan munculnya kesalahpahaman yang fatal tentang relasi antara Islam dan politik. Bernard Lewis (2002), misalnya, melakukan kesalahan fatal di saat menggeneralisasi secara simplifikatif bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah—bahwa umat Islam cenderung menolak demokrasi karena muncul dari Barat—juga terjadi di seluruh kawasan yang lain. Generalisasi yang simplifikatif itu kemudian dia jadikan sebagai argumentasi tesis yang begitu populer—meskipun problematis—selama ini bahwa Islam tidak kompatibel dengan

---

<sup>1</sup> Robert W. Hefner (ed.), *Remaking Muslim Politics, Pluralism, Contestation, and Democratization* (Princeton dan Oxford: Princeton University Press, 2005), hlm. xi-xii dan 4-5.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2-5.

demokrasi dan pluralisme kerakyatan.<sup>3</sup> Tidak aneh kiranya, lanjut Hefner, jika kemudian tesis Lewis beserta argumentasinya itu menuai banyak kritikan dari sejumlah peneliti.<sup>4</sup>

Mempertanyakan kompatibilitas Islam dan demokrasi adalah suatu hal yang sudah “ketinggalan zaman” (*out of date*). Masa dari pertanyaan atau mungkin “tudingan” yang dilontarkan oleh, misalnya, Samuel Huntington<sup>5</sup> tersebut sudah lama berakhir. Berbagai bantahan dan kritikan tajam datang secara bertubi-tubi bahkan dari kalangan sarjana-sarjana Barat sendiri. Sebut saja, misalnya, John L. Esposito (2002), Michael Hirsh (2004), Richard W. Bulliet (2004), dan Robert W. Hefner (2005).<sup>6</sup> Pada akhirnya, seperti ditegaskan oleh Ronald Inglehart and Pippa Norris (2003), dunia Islam dan Barat sebenarnya sama-sama mendukung demokrasi. Perdebatan yang mengemuka di antara dua peradaban tersebut “hanya” berkisar pada “nilai kebebasan individual untuk berekspresi” (*self-expression value*) yang biasanya berporos kepada isu-isu sosial di Barat, semisal hak-hak kaum gay dan kesetaraan total gender.<sup>7</sup> Dengan kata lain, meminjam ungkapan Samsu Rizal Panggabean (2011), sama sekali tidak ada persoalan bagi seseorang untuk menjadi Muslim dan taat terhadap ajaran Islam, di satu sisi, dan menjadi demokratis, di sisi yang lain.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Statemen “legendaris” dan “laris-manis” (*best-selling*) dari Lewis adalah “*what went wrong?*” yang memuat argumen ketidakcocokan Islam dengan demokrasi dan modernitas. Baca: Bernard Lewis, *What Went Wrong?: Western Impact and Middle Eastern Response* (New York: Oxford University Press, 2002).

<sup>4</sup> Hefner, *Remaking.*, hlm. 2.

<sup>5</sup> Selain tesis prediktif “*the clash of civilizations*” (1992) yang terkenal itu, Huntington (1984) juga pernah menyatakan bahwa “*Islam has not been hospitable to democracy*”. Lihat: Gema Martín Muñoz, “Islam and the West: An Intentional Duality”, dalam Gema Martín Muñoz (ed.), *Islam, Modernism, and the West: Cultural and Political Relations at the End of the Millennium*, cetakan I (London dan New York: I.B. Tauris Publisher, 1999), hlm. 14.

<sup>6</sup> Tentang kritik tajam dan bantahan mereka, lihat: John L. Esposito, *What Everyone Needs to Know about Islam: Answers to Frequently Asked Questions, from One of America’s Leading Experts*, edisi II (Oxford: Oxford University Press, Inc., 2011); Michael Hirsh, “Bernard Lewis Revisited: What if Islam isn’t an Obstacle to Democracy in the Middle East, but the Secret to Achieving it?”, *Washington Monthly*, edisi Nopember 2004; Richard W. Bulliet, *The Case of Islamo-Christian Civilization* (New York: Columbia University Press, 2004); Robert W. Hefner (ed.), *Remaking Muslim Politics, Pluralism, Contestation, and Democratization* (Princeton dan Oxford: Princeton University Press, 2005).

<sup>7</sup> Dikutip oleh: Hefner, *Remaking.*, hlm. 2. Lebih lanjut, periksa: Ronald Inglehart and Pippa Norris, “The True Clash of Civilizations”, *Foreign Policy*, edisi 1 Maret 2003.

<sup>8</sup> Samsu Rizal Panggabean, “Negara Demokrasi yang Belajar”, dalam Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean (ed.), *Demokrasi dan Kekecewaan*, edisi digital (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011), hlm. 31.

Hal prinsip yang harus dicatat terkait dengan kompatibilitas Islam dan demokrasi ini adalah bahwa proses demokratisasi yang bergulir di dunia Islam tidak bersifat monolitik atau satu warna. Proses demokratisasi yang berlangsung di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim diwarnai oleh ragam gaya, karakteristik, dan kecenderungan yang berbeda-beda satu sama lain. Proses itu juga tidak jarang diwarnai oleh pasang-surut dan tarik-menarik kepentingan yang cukup sengit dan penuh konflik. Semua itu bisa terjadi, karena—meminjam ungkapan Hefner—proses demokratisasi di dunia Islam sebenarnya masih merupakan “babak awal” (*preliminary*), sehingga lebih tepat disebut sebagai “gerakan” (*movement*). Dinamikanya bergulir dalam “proses menjadi” (*becoming*) yang masih terus berlangsung dan mencari bentuknya hingga saat ini.<sup>9</sup> Menurut Esposito (2010), orang-orang seperti Lewis tidak bisa memahami hal ini karena melupakan kenyataan bahwa dunia Barat sendiri sebenarnya juga sama sekali tidak bersifat monolitik.<sup>10</sup>

### Tiga Karakteristik Politik Islam

Menurut Hefner, untuk bisa memahami pemikiran dan gerakan politik Islam, ada tiga karakteristik politik Islam yang harus dijadikan sebagai titik tolak. Pertama adalah peran para ulama yang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar perkembangan sosial-politik yang terjadi sedapat mungkin selalu selaras dengan prinsip ajaran agama. Namun, karakteristik ini tidak selalu identik dengan teokrasi seperti yang bisa dijumpai di Iran dan Taliban. Mengapa, sebab selain para ulama di negara-negara lain rata-rata bukan penguasa, realitas politik Islam yang berkembang juga tidak menampilkan ciri penyatuan agama dan negara ataupun “diktatorisme” para ulama terhadap publik. Dengan begitu, wacana politik Islam yang berporos pada para ulama sebenarnya lebih bersifat kultural daripada struktural. Karakteristik inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa pemikiran dan gerakan politik Islam begitu beragam. Ketiadaan otoritas tunggal dalam Islam membuka ruang bagi keragaman dan tarik-ulur pemikiran dan gerakan politik Islam, baik pada level elit (para ulama) maupun level *grassroots* (masyarakat).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hefner, *Remaking.*, hlm. 4.

<sup>10</sup> John L. Esposito, *The Future of Islam*, cetakan I (New York: Oxford University Press, 2010), hlm. 143.

<sup>11</sup> Hefner, *Remaking.*, hlm. 5-6.

Kedua adalah mencuatnya demokrasi dan pluralisme kerakyatan sebagai isu utama pemikiran dan gerakan politik Islam yang berkembang dewasa ini. Hal ini tidak lepas dari peran kalangan intelektual publik yang didukung oleh organisasi massa tertentu untuk menyakinkan publik tentang kesesuaian Islam dengan demokrasi dan pluralisme. Namun, penebaran wacana oleh kalangan intelektual publik tersebut tidak bisa dengan serta-merta diidentikkan dengan sekularisasi atau pewacanaan demokrasi sekuler yang bersumber dari Barat. Mengapa, sebab pemikiran dan gerakan politik Islam yang berkembang pada kenyataannya sarat dengan pergulatan wacana dan tarik-ulur otoritas keagamaan, baik pada level elit maupun level *grassroots*. Pergulatan wacana nampak jelas, misalnya, pada ketegangan diskursif seputar demokrasi dan pluralisme antara kalangan pemikir liberal dan pemikir konservatif. Karakteristik ini pula yang menjadi faktor berikutnya—selain karakteristik pertama di atas—yang menyebabkan keragaman pemikiran dan gerakan politik Islam itu sendiri.<sup>12</sup>

Ketiga adalah kenyataan bahwa menguatnya peran dan partisipasi publik dalam kehidupan sosial dan politik tidak lepas dari transformasi sosial-budaya yang terjadi secara massif di dunia Islam pascakolonialisme. Transformasi sosial-budaya yang ditandai, antara lain, oleh meningkatnya tingkat pendidikan, kehidupan ekonomi, mobilitas sosial, dan aksestabilitas informasi tersebut pada gilirannya membangkitkan kesadaran baru sekaligus “hasrat” di kalangan publik untuk lebih berpartisipasi dalam kancah kehidupan sosial-politik. Dalam ungkapan Dale Eickelman and James Piscatori (1996), kenyataan ini merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pewacanaan demokrasi dalam kehidupan sosial-politik (baca: demokratisasi). Karakteristik ketiga ini juga menjadi salah satu faktor keragaman pemikiran dan gerakan politik Islam. Mengapa, sebab meningkat dan meratanya kesadaran politik di kalangan publik tidak hanya membangkitkan hasrat mereka untuk berpartisipasi dalam kancah kehidupan sosial-politik semata, melainkan lebih dari itu mengautkan posisi tawar mereka terhadap wacana demokrasi dan pluralisme yang berkembang.<sup>13</sup>

Keberpijakan kepada tiga karakteristik itulah barangkali yang menjadi argumen Hefner ketika menggunakan model kajian publik yang berorientasi kebijakan (*policy-oriented public scholarship*). Meskipun model kajian seperti ini oleh sebagian pakar ilmu sosial dipertanyakan—karena lebih banyak bertumpu kepada sumber data sekunder, namun dia

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

tetap meyakini bahwa model kajian ini tetap penting dan relevan untuk memotret perkembangan pemikiran dan gerakan politik Islam dewasa ini. Dalam pandangan Hefner, mereka yang mempertanyakan model kajian ini sebenarnya lupa bahwa kebanyakan pakar teori sosial di Barat abad ke-19 dan 20 adalah para intelektual publik—selain juga akademisi—yang selalu merasa tertuntut untuk menyebarkan wawasan mereka kepada khalayak umum. Selain itu, lanjut Hefner, kajian yang mereka lakukan sebenarnya ingin mengungkap dimensi yang cukup impresif dari kehidupan sosial-budaya dunia Islam dewasa ini, yaitu kuatnya intelektualisme publik yang mereka lestarikan secara turun-temurun.<sup>14</sup>

### Fenomena di Turki, Iran, dan Indonesia

Sebagaimana telah ditegaskan oleh Hefner, pemikiran dan gerakan politik Islam dewasa ini begitu multiwarna, di mana demokrasi dan pluralisme kerakyatan menjadi proses dan isu utamanya. Perkembangan yang terjadi di sejumlah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim menyajikan sebuah gambaran bahwa politik Islam tidak bersifat monolitik dan satu warna. Sungguh pun begitu, ragam perkembangan yang terjadi di dunia Islam dewasa ini sebenarnya mengarah kepada sebuah hakikat yang sama, yaitu sebuah dinamika baru dari partisipasi publik dan kontestasi pluralisme. Di mata dunia ketiga yang baru berkembang seperti mereka, kondisi ini meretas jalan bagi cita-cita mereka, yaitu terwujudnya politik Islam yang berkerakyatan dan demokratis (*civil and democratic*). Menurut Hefner, Turki, Iran, dan Indonesia merupakan contoh paling tipikal tentang *mainstreaming* demokrasi dan pluralisme kerakyatan sebagai isu utama pemikiran dan gerakan politik yang berkembang.<sup>15</sup>

#### 1. Turki

Ilustrasi faktual dimulai dari Turki yang menyajikan kontestasi politik Islam bersejarah yang telah menyita perhatian dunia internasional. Hal itu ditandai dengan kemenangan Partai Pembangunan dan Keadilan (Justice and Development Party [JDP] atau Adalet ve Kalkınma Partisi [AKP])—untuk selanjutnya ditulis AKP—pada pemilu tahun 2002 (memenangi 2/3 suara dan merebut 327 kursi parlemen). Padahal partai ini sebenarnya

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 2 dan 11.

adalah partai baru (dideklarasikan pada tahun 2001) dan merupakan kesinambungan sejumlah partai Islam yang pernah dilarang oleh pemerintah sekuler Turki pada dekade sebelumnya. Menurut Hefner, keberhasilan AKP menarik simpati rakyat pemilih, mendulang suara, sekaligus memenangi pemilu terletak pada isu-isu yang diangkat pada saat kampanye pemilu, yaitu pemberantasan korupsi, penyelamatan ekonomi Turki dari krisis berkepanjangan, dan—yang tidak kalah penting—penegakan komitmen partai terhadap HAM, supremasi hukum, pluralisme, dan demokrasi.<sup>16</sup>

Atas dasar itulah, Jenny B. White lebih suka menyebut pemikiran dan gerakan politik AKP sebagai “Muslimhood” daripada “Islamism”. Menurutnya, era Islamisme di Turki telah berakhir serta digantikan oleh “Muslimhood”, sebuah term yang dia buat untuk sebuah gerakan pemikiran ke-Islaman di Turki yang dirintis oleh Fethullah Gülen dan telah menginspirasi transformasi pemikiran secara mendasar pada diri AKP sendiri. Arus utama gerakan pemikiran ini adalah mendukung sepenuhnya demokrasi, HAM, dan kebebasan karena sangat relevan dengan prinsip ajaran Islam, di satu sisi, dan dinamika kehidupan modern, di sisi yang lain.<sup>17</sup>

Namun, seiring dengan kemenangan AKP pada dua edisi pemilu sesudahnya, yaitu pada tahun 2007 dan 2011, maka menyebut isu-isu kampanye sebagai faktor utama tiga kemenangan beruntun dalam pemilu tentu sudah tidak memadai lagi. Harus ada jawaban lain yang bisa menjelaskan mengapa AKP mampu mempertahankan simpati dan dukungan dari rakyatnya. Dalam hal ini, Editorial harian *online* EraMuslim memberikan sebuah ulasan yang menarik bahwa keberhasilan AKP tersebut tidak lepas dari “trio” pemimpin Turki dan AKP sendiri, yaitu (1) Recep Tayyip Erdoğan, ketua AKP dan PM Turki saat ini, (2) Abdullah Gül, pembina AKP dan Presiden Turki saat ini, dan (3) Ali Babacan, fungsionaris AKP dan Deputy PM Turki saat ini. Selain memiliki visi politik dan integritas moral, mereka juga terbukti berhasil melakukan konsolidasi politik internal dalam negeri dan mengatasi krisis ekonomi hanya dalam waktu satu dekade. Mereka juga mampu membuktikan komitmen terhadap demokrasi dan perdamaian dunia, di antaranya dukungan kuat mereka terhadap kemerdekaan Palestina. Di bawah kepemimpinan mereka, Turki berhasil menjadi negara yang begitu diperhitungkan oleh dunia internasional,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 3;

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 87 dan 90-91.

terutama dalam masalah isu politik global.<sup>18</sup> Kekuatan inilah yang menjadi jawaban mengapa AKP yang melabelkan dirinya sebagai “partai politik konservatif” mampu mempertahankan dukungan rakyatnya dalam tiga edisi pemilu secara berturut-turut, meskipun bermunculan tuduhan Islamisasi Turki yang dilancarkan oleh partai sekuler—dalam hal ini adalah oposisi pemerintah.<sup>19</sup> Kenyataan ini, menurut Hefner, menjadi pijakan argumentasi bagi pihak yang berpandangan optimistik terhadap kompatibilitas Islam dengan demokrasi, pluralisme, dan liberalisme, serta sekaligus mematahkan argumentasi pihak lain yang cenderung berpandangan skeptis (seperti Bernard Lewis dkk., pen.) bahwa Islam tidak mungkin bisa kompatibel dengan demokrasi dan modernitas.<sup>20</sup>

## 2. *Iran*

Kontestasi politik yang tidak kalah menarik terjadi di Iran. Hal ini bermula dari kemenangan Mohammad Khatami sebagai Presiden Iran pada pemilu tahun 1997. Sosok Khatami dianggap reformis karena kampanye politiknya yang berfokus kepada isu-isu supremasi hukum, demokrasi, dan peningkatan partisipasi publik Iran dalam proses politik. Kontestasi politik Islam yang digagas oleh Khatami menyebabkan Iran mengalami metamorfosis dari negara Revolusi Islam, Republik Islam, hingga kemudian menjadi negara-bangsa pascarevolusi. Jika pada tahap pertama Iran dipimpin oleh politisi Islamis yang cenderung anti-Barat, maka pada tahap ketiga—sejak era Khatami—Iran berubah secara mengejutkan menjadi negara yang lebih terbuka terhadap dunia Barat, khususnya Amerika Serikat dan Israel, yang dianggap musuh selama ini.

Perkembangan politik Iran pada tahap ketiga ini menunjukkan bahwa arus pemikiran reformis di Iran, meskipun sering berbenturan keras dengan kalangan konservatif, menemukan momentumnya di saat kalangan kelas menengah tampil untuk mengarusutamakan isu-isu demokrasi, pluralisme, dan liberalisme yang berbasis prinsip ajaran Islam. Agama dalam pandangan mereka sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi dan pluralisme kerakyatan.<sup>21</sup> Hal ini tentu saja tidak lepas dari pemikiran politik Khatami yang bisa disaripatkan menjadi tiga pilar, yaitu (1) kosmopolitanisme Islam, (2)

---

<sup>18</sup> [Http://www.erasmuslim.com](http://www.erasmuslim.com), editorial bertajuk “Membandingkan Partai AKP Turki Dengan Partai Islam di Indonesia?”, dimuat tanggal 10 Mei 2013 (akses tanggal 10 Mei 2013).

<sup>19</sup> [Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), artikel “Pemerintahan Islam di Negara Sekuler”, dimuat pada tanggal 5 November 2012 (akses tanggal 10 Mei 2013).

<sup>20</sup> Hefner (ed.), *Remaking Muslim Politics.*, hlm. 3.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.



inklusifisme dan keterbukaan terhadap kelompok lain, dan (3) pandangan bahwa Iran seharusnya tampil bukan sebagai negara Islam, melainkan sebagai negara religius, demokratis, dan pluralis. Tiga pilar pemikiran Khatami tersebut, oleh Bahman Baktiari, disejajarkan dengan pemikiran Gus Dur, tokoh reformis NU yang juga mantan Presiden RI (1999-2001).<sup>22</sup>

Namun, tulisan Hefner dkk. tentu belum mengakses perkembangan politik di Iran yang terjadi beberapa waktu setelah dipublikasikan. Pada tahun 2005, pemilu di Iran dimenangi oleh Mahmud Ahmadinejad yang terkenal secara luas sebagai tokoh konservatif yang sangat loyal terhadap nilai-nilai revolusi Islam Iran. Respon dunia internasional pun beragam; ada yang positif dan ada yang negatif. Respon positif ditunjukkan oleh Rusia, Cina, dan Indonesia. Sementara respon negatif dimunculkan oleh sejumlah negara Barat, dengan tuduhan bahwa kemenangan itu adalah hasil pemilu yang cacat (*flawed*) dan bentuk langkah mundur bagi demokratisasi Iran yang sudah bergulir sejak era Khatami.<sup>23</sup>

Terlepas dari pandangan politiknya tentang demokrasi, konservatifisme Ahmadinejad yang dia tunjukkan dengan kritisismenya terhadap dunia Barat dan kegigihannya untuk mengembangkan program nuklir di Iran pada gilirannya membawa implikasi yang cukup kompleks, baik terhadap kondisi sosial-ekonomi Iran akibat embargo ekonomi dunia Barat maupun terhadap legitimasi politik pemerintahannya di mata rakyat Iran sendiri. Kondisi ini masih belum ditambah dengan semakin kuatnya gerakan oposisi kalangan moderat yang dipimpin oleh Mir-Hossein Moussavi, Mehdi Karroubi, Hashemi Rafsanjani dan Mohammad Khatami yang didukung oleh sebagian besar kaum intelektual, masyarakat kelas menengah ke atas, dan juga pemuka agama di Qom. Konstelasi politik yang terjadi di Iran saat ini tentu saja menyajikan kontestasi politik Islam yang unik antara Ahmadinejad dan kubu konservatif yang mendukungnya—meskipun belakangan diisukan mengalami perpecahan, kalangan reformis yang dimotori oleh Khatami dkk., dan kalangan pragmatis yang digalang oleh pihak militer-sipil.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 112 dan 116-117.

<sup>23</sup> Riza Sihbudi, "Timur Tengah, Amerika, dan Terorisme", dalam Pusat Penelitian Politik LIPI, *Year Book 2005* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 276; <http://www.news.bbc.co.uk>, artikel "Iran hardliner sweeps to victory", dimuat tanggal 25 Juni 2005 (akses tanggal 11 Mei 2013).

<sup>24</sup> Ulya Amalia dkk., "Gelombang Demokrasi Timur Tengah dan Institusi *Velayat-e-Faqih* di Iran", *Laporan Penelitian* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Juli 2011), hlm. 35.

### 3. *Indonesia*

Kontestasi politik Islam yang tak kalah kompleks dan multiwarna juga bisa dijumpai di Indonesia. Menurut Hefner, pemikiran dan gerakan politik Islam di Indonesia menemukan momentum yang luar biasa pascaruntuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Wacana tentang Islam dan demokrasi yang sudah mengemuka sejak dekade 1990-an ini semakin memperkuat argumen keagamaan bagi demokrasi, pluralisme, kesetaraan gender, dan *civil society*. Demokratisasi dan eksperimentasi pluralisme kerakyatan di Indonesia memang sempat tercoreng oleh ragam kekerasan dan konflik etnoreligius, baik yang dilatari oleh konflik politik dalam negeri maupun oleh konspirasi politik global.<sup>25</sup> Tampilnya sejumlah organisasi yang cenderung berhaluan Islamis-paramilitaristik, semisal Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, dan Laskar Mujahidin yang dibentuk oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), menambah kompleks konstelasi demokratisasi dan eksperimentasi pluralisme di Indonesia.<sup>26</sup>

Pada akhirnya, Hefner menyatakan bahwa betapapun konflik dan kekerasan sering terjadi, namun modal sosial untuk demokratisasi dan eksperimentasi pluralisme lebih lanjut sebenarnya belum habis. Konsistensi yang ditunjukkan oleh NU dan Muhammadiyah sebagai dua pilar penting moderasi dan pluralisme kerakyatan menjadi sebuah garansi optimisme prospek demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Kedua ormas terbesar di Indonesia tersebut menunjukkan konsistensinya di saat menolak gagasan penerapan syari'ah Islam yang sempat mencuat pada momen Sidang Istimewa MPR tahun 2002 yang lalu. Pertimbangan utamanya adalah bahwa penerapan syari'ah Islam bisa mendiskriminasi umat agama lain serta mengancam keutuhan bangsa Indonesia yang sangat plural dalam hal agama. Dalam pandangan Hefner, semua itu menggambarkan bahwa Indonesia masih dan tetap memiliki sumber kekuatan yang signifikan bagi demokrasi dan pluralisme kewargaan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Hefner (ed.), *Remaking Muslim Politics.*, hlm. 4.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 284.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 298.

## Transisi Politik Islam di Indonesia

Demokratisasi di dunia Islam, khususnya di Indonesia, memang masih dalam “proses menjadi” (*process of becoming*). Pascatumbangnya rezim Orde Baru (1998), kehidupan sosial-politik Indonesia mengalami—meminjam penjelasan Noorhaidi Hasan (2005)—“masa transisi”, yaitu suatu masa yang tipikal di mana pakem-pakem relasi yang berlaku dalam suatu masyarakat mencair begitu rupa, seiring dengan adanya fragmentasi wacana hegemonik yang dikontrol oleh negara pada masa sebelumnya (Orde Baru). Berbagai kemungkinan bisa terjadi, termasuk di dalamnya situasi kacau yang bisa melapangkan jalan bagi otoritarianisme untuk kembali ke arena kekuasaan politik. Kalaupun bisa terwujud, demokrasi pada konteks ini biasanya selalu diikuti oleh ketidakpastian (*uncertainty*).<sup>28</sup> Dalam kondisi yang serba-tidak pasti tersebut, maka demokrasi yang berkembang di Indonesia—meminjam istilah Yudi Latif (2013)—menampilkan wajah paradoks. Di satu sisi, demokratisasi membawa kebebasan berekspresi dan berasosiasi. Namun, di sisi yang lain, terdapat antagonisme terhadap kecenderungan ini berupa arus balik “politik identitas” (*identity politics*), yang mengukuhkan perbedaan identitas kolektif-etnis, agama, dan bahasa.<sup>29</sup>

Paradoks demokrasi tersebut, meminjam penjelasan Noorhaidi Hasan (2011), tergambar jelas pada lanskap politik di Indonesia saat ini. Menyusul tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, berbagai kelompok militan Islam, semisal Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Laskar Mujahidin, turun ke jalan-jalan meneriakkan tuntutan pemberlakuan syariat Islam, melakukan ragam aksi *sweeping*, dan bahkan mengobarkan jihad. Mereka pun memanfaatkan momentum masa transisi sosial-politik dan demokrasi yang masih paradoksal untuk bersaing merebut ruang publik dan meraih dukungan khalayak luas.<sup>30</sup> Kehadiran mereka, seperti ditegaskan oleh Al Makin (2011), tidak hanya mengancam kohesi sosial-politik masyarakat Indonesia di bawah NKRI yang begitu plural namun harmonis selama berabad-abad, melainkan juga menjadi

---

<sup>28</sup> Noorhaidi Hasan, “Laskar Jihad; Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia”, *disertasi* (Utrecht: Utrecht University, 2005), hlm. 14.

<sup>29</sup> Yudi Latif, “Paradoks Demokrasi”, <http://www.republika.co.id>, diunggah pada 17 April 2013 (akses tanggal 21 Juli 2013).

<sup>30</sup> Noorhaidi Hasan, “Multikulturalisme dan Tantangan Radikalisme”, dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendy*, edisi digital (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011), hlm. 198-199.

pertanda “kegagalan” (*failure*) kalangan Muslim moderat<sup>31</sup> yang sebenarnya adalah mayoritas.<sup>32</sup> Meskipun minoritas, namun kelompok-kelompok Islam radikal terbukti lebih mampu menguasai wacana publik di dalam menyuarakan gagasan-gagasan militan dan menunjukkan ragam simbol dan identitas keagamaan mereka. Sementara, di pihak lain, Muslim moderat yang sebenarnya merupakan kalangan mayoritas, cenderung “diam” (*silent*), enggan menyuarakan pandangan moderat, serta terkesan “membiarkan” suara dan aktivitas Muslim radikal. Meskipun kadangkala menyuarakan penolakan, namun suara mereka seringkali terlalu sumbang. Itulah sebabnya, Al Makin secara pesimistik menganggap bahwa Muslim moderat dewasa ini sepertinya mulai “punah” (*extinct*).<sup>33</sup>

Dalam konteks ini, Noorhaidi Hasan (2002) menawarkan sebuah cara pandang yang menarik terkait dengan “hingar-bingar” kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia. Menurutnya, kelompok-kelompok Islam radikal relatif “bersuara lantang” saat ini, tidak seorang pun yang bisa memastikan sejauhmana mereka mempengaruhi wacana publik di masa yang akan datang. Wacana pemikiran yang mereka suarakan dan gerakan politik yang mereka tunjukkan akan berujung kepada kegagalan di saat berkontestasi dalam lanskap strategis ruang-ruang publik dalam arti yang sebenarnya, karena tidak akan mendapatkan dukungan dari kalangan mayoritas (baca: moderat). Dalam hal ini, dia sependapat dengan Azyumardi Azra (2001) ketika menyatakan bahwa “sekali Indonesia mencapai keseimbangan baru dalam transisi yang menyakitkan ini, maka sebagian besar atau—jika perlu semua—dari kelompok-kelompok Islam radikal akan kehilangan momentum”.<sup>34</sup>

Akan tetapi, menurut Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, perbincangan tidak bisa terhenti hanya pada sikap optimistik seperti itu saja.

---

<sup>31</sup> Menurut Esposito (2002), Muslim moderat sekurang-kurangnya adalah orang yang hidup dan beraktivitas untuk dan di tengah-tengah masyarakatnya, mengupayakan perubahan dari bawah (*from below*), dan menolak ekstrimisme keberagamaan, kekerasan, dan terorisme. Sebagaimana dalam tradisi agama lain, Muslim moderat biasanya mewujudkan sebagai kelompok mayoritas ataupun *mainstream*. Lihat: Esposito, *What Everyone...*, hlm. 148.

<sup>32</sup> Noorhaidi Hasan (2008) menyebutnya sebagai “kegagalan reformasi” (*the failure of reformasi*) dalam menyentuh berbagai masalah mendasar dari reformasi pengelolaan negara terhadap keragaman agama (*religious diversity*). Lihat: Noorhaidi Hasan, “Reformasi, Religious Diversity, and Islamic Radicalism after Suharto”, *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Volume 1, Tahun 2008, hlm. 24.

<sup>33</sup> Al Makin, “Increased Radicalism: The Failure of Moderate Islam”, *The Jakarta Post*, 16 Mei 2011.

<sup>34</sup> Noorhaidi Hasan, “Faith and Politics: The Rise of the Laskar Jihad in the Era of Transition in Indonesia”, *Indonesia*, Nomor 73, April 2002, hlm. 169. Kesimpulan yang sama juga dia tegaskan pada bukunya yang lain, yaitu: *The Making of Public Islam: Piety, Democracy, and Youth in Indonesian Politics*, cetakan I (Yogyakarta: Suka-Press, 2013).

Diperlukan sebuah langkah strategis yang lebih mendasar untuk membendung arus pemikiran dan gerakan Islam radikal yang sedang bergaung dewasa ini. Dalam konteks ini, dia menyebut pentingnya upaya memupuk dan mengembangkan multikulturalisme sebagai bagian dari kerja membangun demokrasi dan masyarakat sipil (*civil society*) sekaligus strategi mengawal keutuhan bangsa. Dengan multikulturalisme, setiap individu dan komponen masyarakat sanggup memberikan tempat, menenggang perbedaan, dan bahkan membantu individu dan komponen lainnya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai toleransi, keterbukaan, inklusivitas, kerjasama, dan perhormatan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama kalangan minoritas, merupakan sejumlah prinsip dasarnya.<sup>35</sup> Sejalan dengan hal ini, Yudi Latif (2013) menegaskan bahwa tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana mewujudkan pengakuan politik (*political recognition*) dan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang menjamin hak individu maupun kesetaraan hak dari aneka kelompok budaya sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan produktif dalam suatu republik.<sup>36</sup>

Senada dengan hal itu, M. Amin Abdullah (2012) menyatakan bahwa radikalisme dan terorisme yang berkembang bak cendawan selepas hujan saat ini sebenarnya adalah “anak kandung” dari modernitas serta hanyalah “realitas hilir” semata. Adapun “realitas hulu” dari persoalan ini adalah tidak terintegrasikannya pola pikir dan pemahaman umat Islam dengan ragam kondisi kekinian. Rasa aman ontologis yang merupakan pilar eksistensi manusia pada gilirannya menjadi lenyap. Keadaan semakin menjadi-jadi, ketika era globalisasi gagal menyajikan keadilan dan kesejahteraan sebagai “menu wajib”-nya. Itulah sebabnya, lanjut Amin Abdullah, untuk membendung arus radikalisme atau deradikalisasi, diperlukan pendekatan yang multi-perspektif (*multi-approaches*), di mana lembaga pendidikan multikultural memiliki peran dan fungsi yang paling strategis, meskipun berjangka begitu panjang.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Idem, “Multikulturalisme.”, hlm. 199, 204, dan 215.

<sup>36</sup> Yudi Latif, “Paradoks.”, <http://www.republika.co.id>.

<sup>37</sup> [Http://www.lazuardibirru.org](http://www.lazuardibirru.org), artikel “Amin Abdullah: Deradikalisasi harus Multi Approach”, Wawancara Wawancara 99 Orang Bicara Radikalisme dan Terorisme, diunggah pada tanggal 26 Juli 2012 (akses tanggal 21 Juli 2013).

## PENUTUP

Dari seluruh uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa kontestasi politik Islam yang terjadi di Turki, Iran, Indonesia, dan sejumlah negara lain yang berpenduduk mayoritas Muslim menjadi sebuah bukti bahwa tidak ada yang tidak selaras antara menjadi Muslim dan mengamalkan ajaran Islam, di satu sisi, dan menjadi demokratis, di sisi yang lain. Mempertanyakan apakah Islam selaras dengan demokrasi tentu sudah tidak relevan lagi. Meskipun tidak bersifat monolitik dan satu warna—bahkan juga diwarnai oleh perdebatan dan pergulatan, dinamika politik Islam yang bergulir sebenarnya bermuara kepada tujuan yang sama, yaitu terwujudnya politik Islam yang berkerakyatan dan demokratis (*civil and democratic*). Hanya saja, harus diakui bahwa dinamika yang terjadi sebenarnya masih bergerak dalam “proses menjadi” (*becoming*) dan “proses pencarian bentuk” yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Itulah sebabnya, dalam pandangan Hefner, dinamika politik Islam dewasa ini masih merupakan “babak awal” (*preliminary*) sehingga lebih tepat jika disebut sebagai “gerakan” (*movement*).

*Last but not least*, tulisan ini dibuat dengan susah payah. Segala daya telah dikerahkan, namun hasilnya masih tetap tidak bisa lebih dari apa yang tersaji. Penyebab utamanya adalah keterbatasan penulis sendiri. Itulah sebabnya, kritik konstruktif sangat diharapkan dari siapapun yang membacanya dan menemukan kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Semoga tulisan ini bermanfaat kepada penulis sendiri dan siapapun yang membacanya. Amin. •

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Ulya, dkk. "Gelombang Demokrasi Timur Tengah dan Institusi Velayat-e-Faqih di Iran". *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Juli 2011.
- Bulliet, Richard W. *The Case of Islamo-Christian Civilization*. New York: Columbia University Press, 2004.
- Esposito, John L. *The Future of Islam*. Ctk. I. New York: Oxford University Press, 2010.
- \_\_\_\_\_. *What Everyone Needs to Know about Islam: Answers to Frequently Asked Questions, from One of America's Leading Experts*. Edisi II. Oxford: Oxford University Press, Inc., 2011.
- Hasan, Noorhaidi. "Faith and Politics: The Rise of the Laskar Jihad in the Era of Transition in Indonesia". *Indonesia*, No. 73, April 2002.
- \_\_\_\_\_. "Laskar Jihad; Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia". *Disertasi*. Utrecht: Utrecht University, 2005.
- \_\_\_\_\_. "Multikulturalisme dan Tantangan Radikalisme". Dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendy*. Edisi digital. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011.
- \_\_\_\_\_. "Reformasi, Religious Duversity, and Islamic Radicalism after Suharto". *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 1, Tahun 2008, hlm. 24.
- \_\_\_\_\_. *The Making of Public Islam: Piety, Democracy, and Youth in Indonesian Politics*. Ctk. I. Yogyakarta: Suka-Press, 2013.
- Hirsh, Michael. "Bernard Lewis Revisited: What if Islam isn't an Obstacle to Democracy in the Middle East, but the Secret to Achieving it?". *Washington Monthly*, Edisi Nopember 2004.
- Hefner, Robert W. (ed.). *Remaking Muslim Politics, Pluralism, Contestation, and Democratitation*. Princeton dan Oxford: Princeton University Press, 2005.

[Http://www.erasmuslim.com](http://www.erasmuslim.com). Editorial bertajuk “Membandingkan Partai AKP Turki Dengan Partai Islam di Indonesia?”, dimuat tanggal 10 Mei 2013 (akses tanggal 10 Mei 2013).

[Http://www.lazuardibirru.org](http://www.lazuardibirru.org). Artikel “Amin Abdullah: Deradikalisasi harus Multi Approach”, *Wawancara Wawancara 99 Orang Bicara Radikalisme dan Terorisme*, diunggah pada tanggal 26 Juli 2012 (akses tanggal 21 Juli 2013).

[Http://www.news.bbc.co.uk](http://www.news.bbc.co.uk). Artikel “Iran hardliner sweeps to victory”, dimuat tanggal 25 Juni 2005 (akses tanggal 11 Mei 2013).

[Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). Artikel “Pemerintahan Islam di Negara Sekuler”, dimuat pada tanggal 5 November 2012 (akses tanggal 10 Mei 2013).

Inglehart, Ronald, and Pippa Norris. “The True Clash of Civilizations”. *Foreign Policy*, Edisi 1 Maret 2003.

Latif, Yudi. “Paradoks Demokrasi”. [Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diunggah pada 17 April 2013 (akses tanggal 21 Juli 2013).

Lewis, Bernard. *What Went Wrong?: Western Impact and Middle Eastern Response*. New York: Oxford University Press, 2002.

Makin, Al. “Increased Radicalism: The Failure of Moderate Islam”. *The Jakarta Post*, 16 Mei 2011.

Muñoz, Gema Martín. “Islam and the West: An Intentional Duality”. Dalam Gema Martín Muñoz (ed.), *Islam, Modernism, and the West: Cultural and Political Relations at the End of the Millennium*. Ctk. I. London dan New York: I.B. Tauris Publisher, 1999.

Panggabean, Samsu Rizal. “Negara Demokrasi yang Belajar”. Dalam Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean (ed.). *Demokrasi dan Kekecewaan*. Edisi digital. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011.

Sihbudi, Riza. “Timur Tengah, Amerika, dan Terorisme”. Dalam Pusat Penelitian Politik LIPI, *Year Book 2005*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.